

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Karanganyar – Jatipuro Km. 01 Ngaliyan, Lalung,
Karanganyar Telp. 0271- 495269 Fax : 0271-494027**

KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini berisi tentang deskripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, tugas umum pemerintahan dan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik kami terima dengan tangan terbuka guna sempurnanya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT. membalas amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara. Amiin.

Karanganyar, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR**

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800314 1999 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA	4
A. Visi dan Misi	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Kepegawaian	6
BAB III CAPAIAN KINERJA	9
A. UrusanWajib Pelayanan Dasar	9
B. UrusanWajib Bukan Pelayanan Dasar	9
C. Urusan Pilihan	10
D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	10
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	11
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	11
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	18
C. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	18
D. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	24
E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	24
F. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	24
G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	25
H. Unsur Kewilayahan.....	25
I. Unsur Pemerintahan Umum.....	25
J. Unsur Kekhususan.....	25
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	26
A. Tugas Yang Diterima	26
B. Tugas Yang Diberikan	26
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL.....	27
A. Penerapan Standar Layanan Minimal	27
B. Pencapaian Standar Layanan Minimal	27
BAB VII PENUTUP.....	28

A. Kesimpulan.....	28
B. Saran	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparaturnya dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparaturnya. Dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar senantiasa ingin mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas (prima). Hal ini memang merupakan salah satu ciri Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan selalu meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar adalah ***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh ;***
- 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat ;***
- 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis ;***
- 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan ;***
- 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.***

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang terdiri dari Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral, Seksi Perindustrian dan Seksi Informasi dan Layanan Pengendalian.

- d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Seksi Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Seksi Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan
- e. Bidang Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Sub Bidang Perizinan Perekonomian dan Sub Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan

Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar antara lain :

- Izin Lokasi/Rekomendasi Pemanfaatan Tanah (RPT);
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- Izin Penggilingan Padi;
- Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Izin Usaha Industri (IUI);
- Izin Usaha Pariwisata;
- Izin Reklame;
- Izin Trayek;
- Izin Sarana Kesehatan;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- Izin Menara Telekomunikasi.
- Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)
- Izin Usaha Penanaman Modal (IUPM)

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 2) .
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106) .
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 43) .
- e. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Nomor : 050/..... TanggalNopember 2019 tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2024.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar ini adalah merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Laporan pelaksanaan tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan SKPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. Visi dan Misi

VISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar : ***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”***.

“.

MISI

Misi merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk mencapai visi. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yaitu :

- 1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh ;***
- 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat ;***
- 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis ;***
- 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan ;***
- 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.***

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan dalam memberikan Pelayanan di bidang penanaman modal, serta pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu yang meliputi bidang: penanaman modal, informasi, penanganan pengaduan, evaluasi dan pengembangan, perizinan pemerintahan dan pembangunan, serta perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
3. pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu yang meliputi bidang: penanaman modal, informasi, penanganan pengaduan, evaluasi dan pengembangan, perizinan pemerintahan dan pembangunan, serta perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu meliputi bidang: penanaman modal, informasi, penanganan pengaduan, evaluasi dan pengembangan, perizinan pemerintahan dan pembangunan, serta perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106). Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini.

D. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dijelaskan sebagai berikut :

1. Daftar Pegawai SKPD

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si	19721104 199203 1 002	PNS	PembinaUtama Muda (IV/c)
2.	MUIS ZAMRONI AZIZ EFENDI, S.Pd.	19631203 199303 1 011	PNS	Pembina(IV/a)
3,	ARY WIDIHASTUTI, S.STP. MM.	198201233 200312 2 001	PNS	Penata Tingkat I(III/d)
4.	Dra. HARTINI, M.M.	19650909 199303 2 008	PNS	Pembina (IV/a)
5.	DIYATMOKO, S.H.	19660508 199503 1 002	PNS	Penata Tk I (III/d)
6.	ERNI RIWAYANTI, S.E.	19650123 198803 2 006	PNS	Penata Tk I (III/d)
7.	Ir. LILIK YULIANTI	19651003 199303 2 009	PNS	Penata Tk I (III/d)
8.	DWI WINARSIH, S.E., M.M.	19730227 199703 2 003	PNS	Penata Tk I (III/d)
9	ROSALIA ANNA CHRISTIANTI TRIANGORO A, S.E.	19680923 198703 2 001	PNS	Penata Tk I (III/d)
10.	JOKO SANTOSA, S.E., M.M.	19750623 200312 1 003	PNS	Penata Tk I (III/d)
11.	JOKO BUDI SANTOSO, S.ST. Par.	19790523 200501 1 010	PNS	Penata Tk I (III/d)
12.	ATIK DWI PRATIWI, SE.,MM.	1980210 200501 2 016	PNS	Penata Tk I (III/d)
13.	SRI HANGRAWITI SUWISMORINI, S.H.	19730402 199503 2 003	PNS	Penata (III/c)
14.	WAHYU TRI YUDANTO, S.Sos., M.M.	19771204 199703 1 001	PNS	Penata (III/c)
15.	KABUL KARYADI, S.E	19720710 199312 1 002	PNS	Penata (III/c)
16.	SAUD ATH THORA, S.E.	19780210 200312 1 006	PNS	Penata (III/c)
17.	SRI HARTINI, S.Sos.	19730922 199603 2 002	PNS	Penata (III/c)
18.	DEWI RAHMAWATI MARFUAH, S.E.	19801010 200902 2 004	PNS	Penata (III/c)

19.	ELVI HARINI,SE	19750713 200501 2 014	PNS	Penata Muda (III/a)
20.	SUNARSA, Amd.	19641123 198902 1 002	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
21.	THATIT KUMALASARI, SE	19750210 201001 2 001	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
22.	ASRI DWI HAPSARI, S.E.	19810116 201001 2 003	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
23.	DIANA PUSPITASARI, A.Md.	19880605 201101 2 015	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
24.	MARJOKO SARMINTO	19680706 200801 1 020	PNS	Pengatur (II/c)

2. Daftar Pejabat Sruktural SKPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN SRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN

Susunan Pejabat Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut :

- Kepala Badan : **Heru Joko Sulistyono S.S.T.P., M.Si.**
- Sekretaris : **Muis Zamroni Aziz Efendi S.Pd.**
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : **Kristanto Wahyu Nugroho, S,Sos.**

3. Daftar Pejabat Sruktural SKPD Yang Belum Terisi

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON

4. Daftar Pejabat Fungsional SKPD (Umum/Khusus)

No.	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL

5. Daftar Pejabat Fungsional SKPD (Umum/Khusus)

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Penanaman Modal

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1,00 Perda Ket.:	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	$\frac{\text{(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1)}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/ kota}} \times 100\%$	Pembilang = 3239041574.00 Penyebut = 52020000000.00 Rupiah Hasil = 0,06
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1,00 SOP Ket.:			
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	1,00 Laporan Ket.:			
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1,00 Kegiatan Ket.:			
	5. Kegiatan pameran penanaman modal	1,00 Kegiatan Ket.:			
	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1,00 Kegiatan Ket.:			
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1,00 Laporan Ket.:			

	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1,00 Laporan Ket.:			
	9. Laporan realisasi penanaman modal	1,00 Laporan Ket.:			
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/ kota	1,00 Kegiatan Ket.:			
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	1,00 Kegiatan Ket.:			
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/ kota	1,00 Laporan Ket.:			

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 319.000.000,00 Realisasi: Rp. 273.160.000,00 Persentase: (85,63%)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 dokumen	100 (100%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 4.250.000,00 Realisasi: Rp. 4.250.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 (10%)		

			Daerah		100 laporan			
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 9.046.000,00 Realisasi: Rp. 9.046.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 100	100 (100%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah laporan retribusi daerah 1 Laporan	1 (100%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A,	1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 314.000.000,00 Realisasi: Rp. 312.341.415,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi 100	100 (100%)		

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase: (99,47%)				
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 55.100.000,00 Realisasi: Rp. 54.923.300,00 Persentase: (99,68%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi 100	100 (100%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 9.250.000,00 Realisasi: Rp. 9.250.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100	100 (100%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Anggaran: Rp. 28.800.000,00 Realisasi:	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 paket	100 (100%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 28.080.000,00 Persentase: (97,50%)				
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 266.355.500,00 Realisasi: Rp. 261.880.000,00 Persentase: (98,32%)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100	100 (100%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 272.554.000,00 Realisasi: Rp. 266.210.000,00 Persentase: (97,67%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 dokumen	100 (100%)		

			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 18.244.500,00 Realisasi: Rp. 18.242.400,00 Persentase: (99,99%)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 paket	100 (100%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 3.557.586.744,00 Realisasi: Rp. 3.345.701.163,00 Persentase: (94,04%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 orang/bulan	100 (100%)		
			l. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 216.600.000,00 Realisasi: Rp. 207.654.589,00 Persentase: (95,87%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 bulan	100 (100%)		

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 165.790.000,00 Realisasi: Rp. 165.310.000,00 Persentase: (99,71%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100	100 (100%)		
			m PROGRAM . PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 114.000.000,00 Realisasi: Rp. 111.431.300,00 Persentase: (97,75%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 unit	100 (100%)		
			n. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A,	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 768.000,00 Persentase:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 laporan	100 (100%)		

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(76,80%)				
			o. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 11.993.200,00 Persentase: (99,94%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100	100 (100%)		
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 167.033.900,00 Realisasi: Rp. 167.033.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100	100 (100%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 258.454.000,00 Realisasi: Rp. 255.820.277,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 laporan	100 (100%)		

			Persentase: (98,98%)				
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PENANAMAN MODAL		a. PROGRAM P ENGENDALIA N PELAKSAN AAN PENANAMAN MODAL, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Anggaran: Rp. 540.194.000,00 Realisasi: Rp. 523.308.000,00 Persentase: (96,87%)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2350 orang	23 (0,98%)		
			b. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Anggaran: Rp. 14.500.000,00 Realisasi: Rp. 14.500.000,00	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	100 (100%)		

			Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase: (100,00%)	berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 kegiatan			
			c. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.850.000,00 Persentase: (99,25%)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5 dokumen	5 (100%)		
			d. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, Kegiatan Pengendalian	1) Pengawasan Penanaman Modal Anggaran: Rp. 56.368.000,00 Realisasi: Rp. 45.007.000,00 Persentase: (79,84%)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	87 (9,94%)		

			Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 875 kegiatan			
			e. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.596.000,00 Persentase: (97,31%)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 100 dokumen	100 (100%)		
			f. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	1) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh	100 (10%)		

		MODAL, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 49.501.000,00 Persentase: (99,00%)	Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1000 orang			
			2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Anggaran: Rp. 246.656.000,00 Realisasi: Rp. 236.847.400,00 Persentase: (96,02%)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5250 pengembang	A PHP Error was encountered Severity: Notice Message: A non well formed numeric value encountered Filename: helpers/dn		

						u_helper.php Line Number: 97 Backtrace: File: /var/www/elppd/v er4/applicat ion/helpers/ dnu_helper .php Line: 97 Function: n umber_for mat File: /var/w ww/elppd/v er4/applicat ion/views/la poran/pela ksanaan_p rogram_dat a.php Line: 103 Function: in d_number3 File: /var/w		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						ww/elppd/ver4/application/controllers/Cetak.php Line: 286 Function: view File: /var/www/elppd/ver4/index.php Line: 315 Function: require_once		
			g. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup	1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Anggaran: Rp. 37.874.000,00 Realisasi: Rp. 36.299.000,00 Persentase: (95,84%)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 35 kegiatan	52,35 (1%) 35 (100%)		

			aten/Kota				
			h. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.794.600,00 Persentase: (98,63%)	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 5 dokumen	5 (100%)	
			i. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.688.200,00 Persentase: (98,75%)	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 100 dokumen	100 (100%)	

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2024 adalah :

A. Tugas yang Diterima

Nihil

B. Tugas Yang Diberikan

Nihil

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

A. Penerapan Standar Layanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar Nomor 067/73 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar. Penjelasan secara rinci terpisah pada lampiran laporan pelaksanaan tugas ini.

B. Pencapaian Standar Layanan Minimal

Standar Layanan Minimal sudah dapat dicapai pada seluruh pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tugas Bab I - VI dan beberapa Penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 16.363 pemohon dengan penerimaan pendapatan untuk kas daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 7.054.566.880, - (133.11%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.300.000.000,-
2. Pada umumnya program kerja telah dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian untuk masa mendatang perlu lebih ditingkatkan pelaksanaan kegiatan agar waktu penyelenggaraan masing-masing kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi yang intensif untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya perizinan melalui beberapa kegiatan pendukung.
2. Perlunya kebijakan di tingkat pimpinan/stakeholder untuk pelayanan perizinan yang lebih supaya mempermudah pemohon/investor agar tertarik berinvestasi di Kabupaten Karanganyar.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800314 1999 1 001